

MODEL LITERASI DIGITAL PEMBELAJARAN AKIDAH BERBASIS KEBANGSAAN DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Achmad Muhibin Zuhri

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: amizuhri@uinsby.ac.id

Winarto Eka Wahyudi

Universitas Islam Lamongan, Indonesia

E-mail: Ekawahyudi1926@unisla.ac.id

Abstract: This paper aims to discuss the faith learning strategies that mainstream the national spirit as one of the human values for students. This study found its relevance because today universities are in the spotlight because their existence is actually fostering the seeds of radicalism, which certainly plays diametrically with human reason. Not only carried out by students, lecturers and professors even justified movements that could potentially create subversion movements in the Republic of Indonesia. Recognizing this phenomenon, then unraveling the tangled thread of the learning process of faith in the field of higher education becomes a necessary effort. For this reason, a learning strategy of faith is needed that can become a tool to strengthen nationalism. The learning strategies in question include: One, internalizing the spirit of nationalism and sensitivity to local culture as the buffer zone of the NKRI pillar. Two, strengthen the tradition of digital literacy in the context of Islamic education. As the main intake of millennial generation, consumption of religious information through the internet must be balanced with the ability to operate digital information. Three, strengthen religious narratives that are more tolerant and humanist in order to strengthen the spirit of national unity.

Keyword: Digital Literacy, Faith, University, Nationality

Pendahuluan

Eksistensi kampus sebagai lembaga pendidikan yang semarak dengan dialektika keilmuan dewasa ini tengah menjadi perhatian. Sebagai institusi yang mendapatkan mandat sebagai tempat untuk

menyemai kader-kader bangsa, sekaligus diharapkan kontribusinya dalam pembangunan nasional, pada faktanya memunculkan citra yang kontra produktif. Hal ini terkait dengan fenomena populisme islam¹ yang semakin masif menyusup di institusi akademik ini.

Data-data yang bisa dilaporkan pada makalah ini guna membuktikan klaim di atas antara lain, pada bulan Maret 2016, sekitar 3.500 mahasiswa berkumpul dan bersumpah untuk menegakkan khilafah di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).² Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengafirmasi bahwa sebanyak 39% mahasiswa sudah terpapar radikalisme. Paramater untuk mengidentifikasi prosentase ini, bahwa mahasiswa menginginkan tegaknya negara islam serta melegitimasi konsep jihad untuk melakukan formalisasi ajaran Islam.

Bahkan Muhammad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menjadi *leading sector* perguruan tinggi, menegaskan dengan merujuk pada data BNPT bahwa sudah terdapat tujuh kampus ternama yang terpapar paham radikal. Antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme.³

Temuan BNPT di atas bisa menjadi afirmasi dari hasil riset yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 terhadap empat perguruan tinggi umum, yakni Universitas Indonesia (UI),

¹ Dalam beberapa tahun terakhir, istilah “populisme Islam” mulai menjadi wacana menarik di kalangan akademisi. Nomenklatur ini digunakan oleh para ahli untuk merujuk pada fenomena politik Islam yang terjadi pada akhir tahun 2016 dan awal 2017 yang dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Terminologi “populisme” sendiri merupakan istilah yang jamak dikenal di dunia politik sebagai sebuah metode yang dipandang efektif untuk meraup suara dari beberapa kalangan antar kelas sosial yang lazimnya disatukan oleh identitas primordia, baik agama, suku atau warna kulit. Untuk memahami lebih jauh tentang populisme islam, bisa dibaca dalam Vedi R. Hafidz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, t.t)

² Sumpah mahasiswa untuk mendukung khilafah ini, diunggah di Youtube pada 30 Maret 2016. Tercatat ada sebanyak 3.500 mahasiswa yang menggelar simposium nasional di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Simposium itu sendiri digelar pada 27 Maret 2016. Video ini per Agustus 2018 sudah ditonton sebanyak 134.832 viewer..

³ Pernyataan Muhammad Nasir ini bisa ditelusuri di portal berita dengan judul, “7 Kampus Negeri Ternama Terpapar Radikalisme, UI dan Undip Termasuk” yang dilansir oleh www.merdeka.com pada 31 Mei 2018.

Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS). Saat itu, Depag (Kini Kementerian Agama) berhasil menemukan bahwa telah terjadi peningkatan *religious activity* di sejumlah kampus-kampus tersebut. Bahkan salah satu *side conclusion*-nya adalah kampus-kampus tersebut menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (*religius*) yang cenderung eksklusif dan radikal. Hasil kajian ini semakin menegaskan, *revivalisme* Islam cenderung menggeliat di kampus umum dan relatif tidak diminati perguruan tinggi berbasis keagamaan (UIN, IAIN, STAIN).⁴

Tidak imunnya kampus-kampus umum terhadap paparan virus radikalisme ini, semakin mendapatkan penguatan setelah Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror membekuk teroris pada tanggal 2 Juni 2018 lalu yang berasal dari Universitas Riau. Penangkapan civitas akademika ini menjadi kian ironi menyusul usaha Densus dalam melakukan pengeledahan di kampus UNRI Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang disana polisi berhasil menemukan bom rakitan.⁵

Uraian data di atas setidaknya menguatkan tesis bahwa bibit terorisme sebenarnya bisa beranak pinak melalui paham keagamaan yang radikal (*radicalism*). Paham keagamaan ini, bisa menyusup melalui mata kuliah, maupun kegiatan keagamaan yang ada di kampus. Adapun konstruk pemikiran yang radikal tidak mempunyai pengertian lain kecuali mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan meruntuhkan nilai-nilai yang telah mapan secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem.

Ciri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi radikalisme, yaitu 1) intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; 2) fanatik dan monopoli kebenaran, hanya menerima kebenaran kelompoknya dan alergi terhadap kebenaran kelompok lain (*truth claim*); 3) eksklusif, cenderung mengidentifikasikan diri mereka berbeda dengan umat Islam pada umumnya; dan 4) bersifat revolusioner, cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

⁴ Sahri, "Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam", Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 6, No. 1, (2016): 247.

⁵ Berita terkait kampus yang dijadikan sebagai *save area* teroris ini, bisa dilacak dengan judul, "Menristek Ancam Pecat Rektor UNRI Terkait Radikalisme" yang dilansir oleh www.cnnindonesia.com yang diunggah pada tanggal 4 Juni 2018,

Ciri radikalisme ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Charles Kimball dalam *Religion Becomes Evil* bahwa agama akan menjadi bencana atau radikal jika ditandai lima hal, yakni 1) mengklaim kebenaran mutlak (*absolute truth claim*), padahal kebenaran mutlak hanya milik Tuhan; 2) menuntut ketundukan buta (*blind obedience*) yang mengingkari perintah kitab suci untuk berpikir kritis; 3) menginginkan kembali pada masa keemasan (*establishing the ideal times*) yang justru mengingkari gerak waktu yang tak pernah surut ke masa lalu dan tiap zaman memiliki problem tersendiri yang menuntut jawaban berbeda; 4) membenarkan segala cara (*the end justifies any means*), padahal tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik; 5) menyatakan perang suci (*declaring holy wars*), di mana perang sejatinya kotor tidak ada yang suci.⁶

Menyadari serta memahami realitas di atas, maka mendesain ulang proses pembelajaran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) menjadi satu ikhtiar yang niscaya. Walaupun pada faktanya, PAI dianggap sebagai materi yang selama ini “*diada-adakan*” untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan agama sebagai salah satu asupan dalam proses pendidikan.

Pemikiran, pemahaman sampai pada tahap tindakan bernuansa radikal yang dijustifikasi dengan dalih ajaran agama, tentu sangat kontra produktif dengan spirit akademik perguruan tinggi yang menjamin kemerdekaan berekspresi, beraspirasi dan berkeyakinan. Namun pada wajah lain kebebasan beresekspresi ini menjadi kuda tunggang dalam membiakan bibit radikalisme yang secara ghalib berkonsekuensi pada sikap intoleran yang justru jauh dari spirit kampus sebagai wadah dialektika keilmuan yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat.

Sebagai bagian dari mengurai permasalahan radikalisme di kampus yang berpotensi meruntuhkan pilar-pilar kebangsaan, maka diperlukan ikhtiar akademik guna memutus mata rantai pertumbuhan bibit kekerasan yang mengatasnamakan agama yang menjadikan kampus sebagai habitatnya. Salah satunya adalah dengan mendesain ulang atau melakukan improvisasi pembelajaran pendidikan islam aspek akidah, dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip kebangsaan. Sehingga, pendidikan islam menjadi media menyemai paham keislaman yang inklusif, dan pada sisi yang lain integrasi bangsa sekaligus spirit nasionalisme dapat dikembangkan melalui pendidikan islam.

⁶ Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil*, cet. 10 (USA: HarperCollins Publishers Inc, 2008), 49-166.

Konsepsi Teoritik tentang Kebangsaan (*Nationality*)

Secara etimologis nasionalisme atau kebangsaan berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Bangsa disini mempunyai dua pengertian, yaitu dalam pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politik.⁷ Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Adapun bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam satu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi keluar dan kedalam.

Secara lebih spesifik mengenai pengertian nasionalisme, penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ahli tentang definisi nasionalisme tersebut, antara lain dalam *Encyclopaedia Britannica* menyatakan bahwa nasionalisme merupakan keadaan jiwa, dimana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan. Sedangkan menurut Huszer dan Stevenson, Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah air.

Ali Mahsan Moesa menyitir pernyataan Ernest Renan tentang definisi dari Nasionalisme, dalam bukunya *nation and narration* dikatakan bahwa bangsa (*nation*) adalah kesatuan solidaritas yang digantungkan atas kehendak warganya untuk hidup secara bersama dalam identitas kolektif baru yang melampaui garis-garis primordial-sektarian.⁸ Identitas kolektif dalam konteks ini, menurut Renan tidak dapat disamakan dengan kesatuan masyarakat yang didasarkan pada kesamaan ras, budaya bahkan agama. Karena bangsa merupakan jiwa atau *something spiritual*. Sedangkan Benedict Anderson mempunyai pandangan berbeda mengenai konsep nasionalisme.

Dalam karyanya yang berjudul *Imagined Community* (1983) Anderson mengemukakan bahwa bangsa (*nation*) merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political community*) yang bermakna bahwa anggota dari bangsa tersebut terdiri dari beragam elemen yang tidak mungkin kenal satu sama lain secara keseluruhan, tetapi dalam benak dan bayangan, merekamenyadari akan pentingnya

⁷Aminudin Nur, *Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1967), 87.

⁸Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (Yogyakarta: Lkis, 2007). xi

sebuah wujud kesatuan bangsa yang melampaui luasnya jarak demografis. Bangsa yang dibayangkan ini, terwujud karena faktanya tersekat oleh zona geografis dalam satu Negara atau bahkan dipisahkan oleh bangsa lain. Sebuah bangsa yang berdaulat dan cita-citakan karena memiliki kesamaan sejarah serta perasaan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kelompok lain. Nilai universal inilah yang membentuk nasionalisme Indonesia yang mengikat keragaman etnis, suku bangsa dan agama.⁹

Lebih jauh lagi, Anderson mengemukakan bahwa semangat kebangsaan dan rela berkorban yang muncul dari komunitas yang dibayangkan tersebut disebabkan dari sumber yang muaranya terdiri dari dua aspek, yakni ketidak efektifan sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh komunitas agama tertentu serta adanya ketidakpercayaan kolektif atas model pemerintahan dinasti yang dikendalikan oleh raja yang menganggap dirinya adalah wakil Tuhan di bumi.

Dengan kata lain, baik Renan maupun Anderson menganggap bahwa agama bukan sebagai faktor pokok terbentuknya suatu bangsa atau sikap nasionalis. Anderson bahkan lebih tegas menyatakan bahwa justru karena dampak negatif agamalah konsep nasionalisme ini terbentuk.

Dari sedikit paparan diatas mengenai konsep nasionalisme, dapat dipahami bahwa nasionalisme merupakan *supremeloyalty* terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan tersebut muncul karena adanya kesadaran identitas kolektif yang berbeda dengan lainnya.¹⁰ Pada kebanyakan kasus, hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa atau budaya. Namun, yang paling substansial tentang konstruk nasionalisme adalah adanya rasa kemauan untuk bersatu "*a living and active corporate will*". Sehingga, melihat pemaknaan nasionalisme diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya konsep nasionalisme bukanlah hal yang statis. Entitasnya selalu berubah sesuai dengan kondisi yang membentuknya, ia juga bukan sesuatu yang *given*.

⁹ Ang, I. "Between Nationalism and Transnationalism: Multiculturalism in a Globalising World". *Institute for Culture and Society Occasional Paper* 1.1, 1(1), 2010, 1–14.

¹⁰ S. Atanasovski, "Hybrid affects of religious nationalism: Pilgrimages to Kosovo and the Soundscapes of the Utopian Past". *Southeastern Europe*, 39(2), 237–263. <https://doi.org/10.1163/18763332-03902005>

Berdasarkan realitas diatas, maka Kohn mengkategorisasikan nasionalisme menjadi dua, yaitu nasionalisme tertutup (*closed nationalism*) dan nasionalisme terbuka (*opened nationalism*). Nasionalisme tertutup dicirikan dengan penempatan karakter bangsa yang asli, seperti asal-usul ras dan daerah (keturunan). Artinya, nasionalisme ini determinasi biologis dan keturunan menjadi unsur yang penting dan sangat ditekankan. Adapun nasionalisme terbuka kurang memperhatikan hal-hal diatas, pada nasionalisme ini mempunyai kecenderungan kearah kebersamaan dalam relasi-relasi dengan basis suatu masyarakat politis di mana warga negaranya terlepas dari kategori etnis maupun ras.¹¹

Sehingga, dari gambaran diatas secara lebih konkrit nasionalisme atau kebangsaan adalah sebuah paham yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan bernegara. Dari pemahaman nasionalisme seperti ini, lahirlah ide dan perjuangan untuk mewujudkan negara-bangsa (*nation-state*). Secara empirik, hal-hal inilah yang merupakan faktor atau unsur pokok yang obyektif dan teramat kuat membentuk nasionalisme serta membantu mempercepat evolusi nasionalisme kearah pembentukan Negara nasional walaupun tanpa mengeliminir unsur-unsur keragaman etnis di dalamnya.¹²

Orientasi negara nasional dari konsep nasionalisme ini menampilkan diri, pertama dan yang paling utama sebagai respon atas gerakan kolonialisme sehingga menuntut hak kemerdekaan sebuah bangsa, baru selanjutnya negara bisa membentuk sebuah tatanan negara demokrasi.¹³ Oleh karena itu, nasionalisme dapat dipahami bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, ada akar historisnya, hanya saja akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Berdasarkan bidang keilmuan, jenis penelitian ini adalah penelitian pendidikan yang dikaji melalui analisa sosial-keagamaan, yaitu pengkajian akademis terhadap

¹¹Lihat Hans Kohn, *Nationalism*, dalam Antoni Crespigny and Jeremy Cronin (ed), *Nasionalisme dan Sejarah*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1961), 153.

¹² Sayegh, p. Y. (2011). "Nationalism As a Social Imaginary: Negotiations of Social Signification and (Dis)Integrating Discourses in Britain", *France and Poland*, 321.

¹³Nasikun, *Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk*, dalam Ariel Harianto, *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3.

model pembelajaran di era digital.¹⁴ Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap suatu aktifitas akademik yang dibangun dalam kultur pendidikan di Perguruan Tinggi Umum.¹⁵

Posisi Pembelajaran Akidah dalam Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Umum

Untuk menelisik posisi pembelajaran akidah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, secara regulasi bisa dilacak melalui Undang-Undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tepatnya pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan¹⁶ yang diperkuat dengan landasan yuridis berdasarkan peraturan pemerintah No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.¹⁷

Antara Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang dijabarkan dalam PP No 5 Tahun 2007 ini dijelaskan dalam konteks institusi pendidikan, bahwa Pendidikan Agama berkedudukan sebagai mata pelajaran pada sekolah atau mata kuliah pada Perguruan Tinggi¹⁸. Selain itu, dalam pendidikan agama yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut juga menjamin atas akses, tempat dan kesempatan peserta didik untuk beribadah dan belajar sesuai dengan agama yang dianutnya.

Berbeda dengan Pendidikan Agama, maka Pendidikan Keagamaan dalam Pemerintah No. 55 Tahun 2007 dimaknai bukan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah agama, melainkan berbentuk satuan atau program pendidikan yang didirikan baik oleh Pemerintah, pemerintah Daerah atau Masyarakat dengan basis keagamaan. Satuan Pendidikan Keagamaan yang dimaksud, bisa berbentuk pendidikan formal, non-formal dan informal sesuai dengan agama masing-masing. Secara lebih tegas, pendidikan keagamaan bisa berbentuk madrasah, sekolah katolik, Widya Pasraman baik tingkat Pratama, Adi, Masyama

¹⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya: 2001), 109-110

¹⁵ Rob Fisher, "Pendekatan Filosofis" dalam Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LkiS, 2002), 167.

¹⁶ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesembilan, Pendidikan Keagamaan, 11.

¹⁷ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

¹⁸ PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 4.

atau Utama untuk agama Hindu, pesantren, diniyah dan lain sebagainya.¹⁹

Selanjutnya dalam konteks pembangunan nasional, pada dasarnya PP No 55 Tahun 2007 ini berusaha untuk membentuk karakter atau kepribadian warga Negara dalam konteks hubungan antar umat beragama, interaksi antar warga Negara agar tercipta sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama. Dari sini sebenarnya sudah bisa dipahami, bahwa poin penting pendidikan agama di lembaga pendidikan, dalam konteks ini perguruan tinggi, adalah terbentuknya hubungan yang harmonis serta perikehidupan yang bersinergi antar warga negara, tanpa menonjolkan sensifitas primordial masing-masing agama. Hal ini tentu juga harus diimbangi dengan pengetahuan agama yang sesuai dengan diversitas Indonesia sebagai negara yang multikultur dan plural.

Secara lebih tegas misalnya, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan sekaligus membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan masing-masing.

Bahkan secara lebih implisit, disebutkan juga bahwa Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Selain itu, Pendidikan agama juga mempunyai tujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Adapun untuk Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Ditegaskanpula bahwa Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan juga bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-

¹⁹ PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 9 dan 10.

nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Strategi Pembelajaran Akidah berbasis Kebangsaan di Perguruan Tinggi

Secara sekilas, istilah akidah dan kebangsaan merupakan kata yang sulit ditemukan nalar mutualistiknya. Jika dipandang dengan perspektif normatif, kedua terminologi ini memiliki basis konseptual yang mengandung keterjarakan sangat jauh. Jika akidah merupakan konsep yang lazim membicarakan hal ihwal yang bersifat transendental, maka kebangsaan menjadi diskursus kajian yang lebih bersifat profan. Jika yang sakral atau transeden cenderung bersifat keyakinan (*Faith*), maka profan adalah istilah yang merujuk pada suatu keniscayaan. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah, bagaimana menjembati suatu yang transendental agar kompatibel dengan hal yang profan?

Melalui asumsi akademik inilah, perlu membuat rancang bangun pembelajaran akidah, yang lazim hanya mendiskusikan “wacana langit” sehingga perlu dikemas agar materi ajar lebih membumi. Untuk itulah, strategi pembelajaran akidah harus memprioritaskan faktor dampak, disamping peningkatan wawasan keislaman *an sich*.

Kata kunci untuk menjembatani keduanya adalah melalui strategi pembelajaran. Adapun pemaknaan dari konsep strategi pembelajaran adalah kegiatan instruksional yang harus dilakukan oleh pendidik sekaligus peserta didik, agar tujuan pembelajaran bisa tercapat secara efektif dan efisien.²⁰ Definisi ini menjelaskan bahwa strategi pembelajaran tak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan peserta didik dan sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran.²¹

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa gambaran proses pendidikan, dalam hal ini juga sekaligus strategi pembelajaran,

²⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 126.

²¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 20.

tak bisa mengesampingkan empat hal pokok, yaitu: guru, peserta didik, sumber belajar dan lingkungan pembelajaran. Mengoptimalkan keempat elemen inilah yang menjadi determinasi penting dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Proses pembelajaran sendiri merupakan penerjemahan secara praktis tentang konsep pendidikan, yang dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²²

Untuk itu, antara pendidikan dan pembelajaran jika dipahami dalam konteks sistem pendidikan nasional memiliki mandat tak hanya persoalan pengembangan potensi diri melalui wawasan keilmuan yang matang, namun juga kepribadian yang baik serta kompetensi spiritual keagamaan yang mapan dalam rangka turut serta memberikan andil memajukan bangsa dan negara.

Dalam konteks pembelajaran akidah, sebagai bagian dari pendidikan agama islam di perguruan tinggi, jika merujuk pada pemaknaan atas pembelajaran sesuai dengan regulasi Undang-Undang, *learning outcome* dari pembelajaran akidah, juga harus mampu menjadi piranti memperkuat semangat kebangsaan melalui paham keagamaan yang toleran, inklusif serta terhindar dari paham-paham yang berpotensi menggilas sendi-sendi kesatuan dan persatuan warga negara.

Strategi pembelajaran akidah yang bisa ditawarkan sebagai rekomendasi akademik atas terancamnya nalar nasionalisme mahasiswa dewasa ini, adalah dengan melakukan hal sebagai berikut.

1. Internalisasi Nasionalisme melalui Konsep Tauhid

Salah satu konsep kunci dalam pembelajaran akidah adalah konsep ketauhidan. Dalam tradisi keagamaan, bahkan orientasi utama seorang hamba adalah untuk mengesakan Tuhan dalam segala aktifitas apapun. Osman Bakhash misalnya, memaparkan bahwa nilai suatu peradaban terletak pada satu prinsip inti, yaitu sebuah credo

²² UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1.

yang memuat komitmen “atas dasar apa peradaban itu didasarkan”.²³ Dalam konteks akidah islam, peradaban betapapun tingginya harus didasarkan pada penghambaan terhadap Allah swt.

Komitmen keagamaan ini, sesungguhnya memiliki makna bahwa peradaban tertentu selalu memiliki suatu paradigma dalam melihat realitas dunia. Bangunan konsep aqidah (*tawhid*) yang memiliki vitalitas-pun akhirnya tidak sekedar dimaknai pada peng-esa-an Allah SWT. Yang dalam istilah lain menegaskan bahwa satu-satunya *Illah* yang layak untuk disembah melainkan Allah.

Namun konsep ketauhidan dalam konteks negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, juga membawa implikasi sosiologis bahwa mengesakan Allah berarti meniscayakan ciptaannya yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam surah al-Hujurat: 13 (*waj'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu*).

Keniscayaan sosiologis ini, bahkan lebih ditegaskan dalam al-Quran yang menarasikan atas kesanggupan Allah untuk menjadikan umat manusia seragam, bukan beragam. Namun Allah justru menjadikan umat manusia beragam dalam rangka untuk mengesakan dan menegaskan kekuasaan Allah. Sebagaimana yang terangkum dalam surah al-Maidah: 48 (*wa lawsha Allahu laja'alakum ummatan wahidah*).

Konsep tauhid semacam ini, merupakan modal besar dan utama dalam membentuk warga negara yang memiliki spirit kesatuan dan persatuan sebagaimana yang tercermin secara jelas, bahkan tidak hanya di dalam pancasila, namun juga menjadi salah satu pesan langit, al-Quran.

Strategi pembelajaran akidah, baik yang berkaitan dengan materi keimanan kepada Allah, rasul, kitab-kitab Allah, Qadha' dan qadar serta hari akhir, diarahkan pada sistem ketauhidan yang berdampak pada ketauhidan sosial, atau ketauhidan nasional. Dengan kata lain, menjadi seorang muslim sejati dalam konteks keindonesiaan, adalah dengan memperkokoh akidah agama dan kaidah bernegara sekaligus. Sehingga, akan terhidar pada benturan agama dan negara sebagaimana yang jamak tercermin di negara Timur Tengah. Yang

²³ Osman Bakhash, *Islamic Contribution within the World Civilization; Past, Present, and Future* dalam Proceeding JICMI (Jakarta International Conference of Muslim Intellectuals) 2013),15.

menjustifikasi menegakkan agama dengan merobohkan negara dan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk itu, menginternalisasikan spirit nasionalismemerupakan startegi pembelajaran akidah yang relevan diterapkan saat ini. Guna meneguhkan pilar-pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tataran implementatifnya, Indonesia sejatinya telah mempunyai konsep tauhid sosial yaitu Pancasila. Selain sebagai *commond value*, pancasila dengan kredo *bhenika tunggal ika*-nya merupakan manifestasi ketauhidan yang mengambil segememntasi sosiologis. Memahami hal inilah maka mayoritas umat islam di Indonesia tidak keberatan jika Pancasila dijadikan sebagai landasan ideal bernegara. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran islam. Justru pancasila merupakan penerjemahan spirit islam pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi melalui piagam madinah (*dustur madinah*)²⁴

2. Literasi Digital sebagai Media Informasi Keagamaan

Josh James pernah melansir sebuah data yang dikemas melalui Infographic dengan titel *Data Never Sleeps 2.0*, yang mengungkapkan bahwa di dunia maya, pada setiap menitnya memproduksi konten yang luar biasa banyaknya. Untuk gambaran saja, misalnya youtube melalui *user*-nya tiap menit mengupload 72 jam konten video baru, sedangkan facebook membagikan 2.460.000 status dari penggunaannya, twitter membagikan 277.000 *tweet*, dan pengguna instagram mengupload sekurang-kurangnya 216.000 foto atau gambar per menit.²⁵

²⁴ Para sejarawan mengistilahkan piagam madinah sebagai naskah politik pertama sekaligus tertua di dunia ini, dengan beragam penamaan. Misalnya W. Montgomery Watt menyebutnya dengan “*The Constitution of Medina*”, R.A. Nicholson mengistilahkan dengan “*charter*”, adapun Majid Khadduri menyebutnya sebagai “*treaty*”, ahli sejarah Arab kawakan Philip K. Hitti menyebut dengan istilah “*agreement*”, Zainal Abidin Ahmad dengan “piagam”. Baca selengkapnya dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995), 2.

²⁵ Jika ingin melacak lebih lengkap tentang sebaran informasi di dunia digital, infografis yang dilansir oleh *Data Never Sleep 2.0* ini bisa di temukan pada *search engine* karena bersifat *open access*.

Sementara itu, internetlivestats.com mencatat hingga pertengahan Juni tahun 2014 jumlah website di dunia sebanyak 2.925.249.355 laman. Jumlah tersebut sudah termasuk website yang tidak aktif namun hanya berupa laman *parked domains*. Sedangkan untuk dunia blog seperti Wordpress dan Tumblr, menurut webpagefx.com bahwa ada 42.6 juta posting terbaru setiap bulannya, baik yang menggunakan *self hosted* maupun di *hosted* Wordpress itu sendiri. Kemudian ada 900 posting terbaru setiap detik di blog Tumblr. Kondisi itu belum ditambah dengan platform blog-blog lain misalnya seperti Blogger, Weebly, dan Livejournal. Dapat dibayangkan berapa banyaknya informasi yang tercipta dalam setiap menitnya di dunia maya.

Gelombang generasi millennial tak bisa dipungkiri menjadi ujung tombak penetrasi internet di Indonesia. Lahir dan besar bersama derasnya era informasi dan digital. Salah satu temuan yang turut mengafirmasi atas lahap dan hikmadnya generasi muda -dalam konteks ini adalah mahasiswa- adalah bagaimana pola perilaku pengguna internet di Indonesia sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa mahasiswa merupakan pengguna terbanyak setelah pekerja-wiraswasta dalam menggunakan internet daripada sektor lain.²⁶

Jumlah informasi yang tercipta di internet, baik berupa numerik, teks, gambar, audio atau video adalah salah satu ciri bahwa di era ini setiap mahasiswa dapat memanfaatkannya guna membangun performansi pembelajaran. Karena saat ini, media digital sangat besar intervensinya dalam proses pembelajaran.²⁷ Dampak yang paling bisa dirasakan akibat dari budaya maya (*cyber culture*) adalah cara pembelajaran agama islam.

²⁶ Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. Adapun pengguna internet dari kalangan siswa dan mahasiswa sebanyak 18,6 juta.

²⁷ Sahmiar Pulungan, "Pemanfaatan ICT Dalam Pembelajaran PAI", *Query: Jurnal Sistem Informasi*, 1, No. 1, (2017): 1.

Banyak mahasiswa saat ini, terutama pada perguruan tinggi umum yang cenderung kesulitan untuk mencari dan menemui ulama yang ideal dalam mengajarkan ilmu agama, menjadikan akses informasi internet sebagai jalan alternatif mempelajari agama islam. Tanpa disadari, apabila mahasiswa salah memilih konten informasi atau berita, bahkan keliru dalam mengecap asupan informasi keagamaan melalui narasi di dunia maya, berpotensi melahirkan pemikiran yang intoleran dalam beragama sampai pada tahap terjerumus dalam paham radikalisme.²⁸ Karena telah tervalidasi, perekrutan terorisme, penanaman paham radikal bahkan sampai perakitan bom, justru dilakukan melalui jejaring media sosial.²⁹

Fenomena ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNPT yang menyatakan sejak tahun 2014, jumlah website yang bermuatan atau mengajarkan paham radikal berjumlah 9.800-an, dan pada tahun selanjutnya 2015, naik mencapai kisaran angka 15.000 website yang memuat konten dengan narasi-narasi kekerasan.³⁰

Menyadari realitas keberagamaan ini, maka tantangan terbesar PAI di perguruan tinggi adalah bagi para dosen harus mampu melakukan kontrol terhadap mahasiswanya serta membentengi dari gelombang informasi yang sangat sukar terverifikasi.

Untuk itulah, internet sebagai sumber pembelajaran terbuka harus diimbangi dengan kemamuan literasi digital. Gilster dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy* (1997) sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud menerangkan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami sekaligus mampu menggunakan

²⁸ Munir, *Multimedia: Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 206.

²⁹ Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan pada rentangan waktu 1 September – 7 Oktober 2017 dengan melibatkan 2.181 responden dari 34 propinsi di seluruh Indonesia menghasilkan kesimpulan yang menghentak. Setidaknya, sebanyak 80% mahasiswa berpotensi lebih intoleran karena paparan informasi internet dibanding generasi yang tidak menjadikan internet sebagai asupan informasi utamanya.

³⁰ Info terkait besaran website dengan narasi radikal ini, bisa dilacak informasi yang dilansir oleh www.tirto.id pada tanggal 18 Mei 2016 dengan judul, “BNPT: Awasi Gerak Langkah Teroris di Dunia Maya!” <https://tirto.id/bnpt-awasi-gerak-teroris-di-dunia-maya-83R> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018

informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer.³¹

Untuk itu, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital dalam konteks saat ini, sama pentingnya dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki. Karena, generasi yang tumbuh dengan akses informasi tanpa batas, cenderung mempunyai pola berpikir yang berbeda dan relatif memiliki proses berpikir instan dibanding generasi sebelumnya. Pada gilirannya, setiap orang tentu harus paham bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Dunia maya saat ini semakin disesaki konten yang berita bohong (*fake news*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran serta menanamkan pemahaman tentang bagaimana mengoperasionalkan piranti teknologi berbasis internet dengan ramah dan edukatif, apalagi yang berhubungan dengan pemahaman akidah keagamaan.

Menjadi literat digital berarti berkompeten untuk tak hanya sekedar memproses berbagai informasi, namun juga memahami pesan di dalamnya sekaligus dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengomunikasikan, menghargai, berkolaborasi, menghormati yang dilandasi dengan keadaban publik. Mahasiswa harus mampu memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat berisiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan gerakan ideologi radikal dan intoleran yang mengatasnamakan agama.

³¹ Tim GLN Kemendikbud, *Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 8.

Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital harus dijadikan tradisi dalam pembelajaran perguruan tinggi. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan agama islam dalam konteks era *disruption 4.0*.

Literasi digital di kampus diarahkan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringannya. Melalui kemampuan tersebut, civitas akademika dapat mengolah dan membuat informasi baru, kemudian menyebarkannya secara bijak. Selain mampu menguasai dasar-dasar komputer, internet, program-program produktif, serta keamanan dan kerahasiaan sebuah aplikasi, mereka juga diharapkan memiliki gaya hidup digital sehingga semua aktivitas kesehariannya tidak lepas dari pola pikir dan perilaku masyarakat digital yang serba efektif dan efisien.³² Adapun Tujuan literasi digital di lingkungan sekolah mencakup:

- a. Meningkatnya kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menggunakan media digital dan internet di lingkungan sekolah;
- b. Meningkatnya sikap positif, bijak, cermat, dan tepat dalam menggunakan dan mengelola media digital dan internet di lingkungan sekolah;

Karya Douglas A.J. Belshaw yang berjudul *What is Digital Literacy?* (2011) yang dikutip oleh Kemendikbud bahkan telah mengkategorikan delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut: 1) Kultural, 2) Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten; 3) Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual; 4) Komunikatif, yaitu memahami teknik komunikasi di dunia digital; 5) Kepercayaan diri; 6) Kreatif, mencipta hal baru yang positif; 7) Kritis dalam menyikapi konten; dan 8) Bertanggung jawab secara sosial.³³

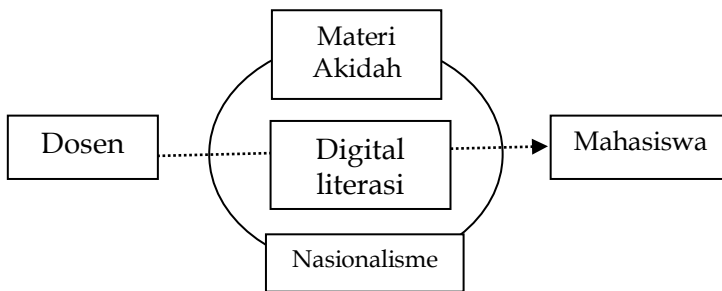
³² Tim GLN Kemendikbud, *Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 16.

³³ Tim GLN Kemendikbud, *Peta Jalan Gerakan.....*, 7.

Dari beberapa aspek di atas, Belshaw menekankan aspek kultural yang eksistensinya sangat krusial. Hal ini mengingat karena memahami konteks pengguna (baca: kultural) akan membantu kinerja kognitif dalam menilai dan mengkritisi konten.

Sehingga, dalam menghadapi era millennial ini, pendidikan harus memenuhi “ruang kosong” yang sampai hari ini masih sangat minim perhatian. Yakni kecakapan literasi digital. Kompetensi ini, diharapkan mampu mendongkrak pengetahuan dan kecakapan peserta didik untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, serta patuh pada hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.³⁴

Maka dalam konteks pembelajaran akidah, mahasiswa yang dewasa ini memiliki kecenderungan mengambil informasi internet sebagai media belajar, harus dibekali dengan kemampuan literasi digital guna menghindari narasi dan materi pendidikan islam, khususnya dalam konteks akidah yang berpotensi mengandung muatan-muatan kekerasan dan intoleransi. Jika divisualisasikan, maka akan tergambar pada bagan berikut:



Gambar 1. Pembelajaran akidah berbasis literasi Digital

3. Pengarusutamaan narasi akidah Islam yang lebih toleran

Adanya kenyataan bahwa menjadi seorang muslim yang “taat” bukan berarti menjadi seorang warga negara yang taat secara sekaligus, merupakan keniscayaan yang menyayat akal sehat. Kasus-kasus terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia dalam rentangan waktu satu dekade belakangan, memperlihatkan bahwa para pelaku

³⁴ Tim GLN Kemendikbud, *Peta Jalan Gerakan.....*, 8.

tindakan teror, justru dilakukan oleh seseorang atau bahkan kelompok yang memperlihatkan aksesoris keagamaan yang memenuhi “standar keshalehan”.

Dari kenyataan ini, lantas apakah bisa disimpulkan bahwa ajaran agama mendidik seseorang untuk berperilaku garang dan cenderung menyerang kelompok masyarakat lain yang tak sepaham? Jika memang benar asumsi ini, maka betapa eksklusif dan kakunya agama islam.

Tentu stigma ini sebenarnya bisa diruntuhkan baik secara ilmiah maupun fakta sejarah. Bahwa bangunan agama islam dikonstruksi oleh sikap yang ramah dan toleran. Nabi bahkan tak pernah menyerang pihak manapun terlebih dahulu sebelum di serang, bahkan dalam keadaan perang sekalipun.

Sikap toleran ini, bahkan pernah ditegaskan oleh Nabi Muhammad yang termaktub dengan sangat rapi melalui sebuah hadits dari jalur Ibnu Abbas ra, bahwa dalam sebuah kesempatan Rasulullah saw. pernah ditanya, "Agama apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? (*ahabbu ad-din ilallah*) Beliau menjawab, "*al-Hanifiyatu al-sambah*" (yaitu agama yang lurus lagi memudahkan, *toleran-red*).³⁵

Oleh karena itu, Ibnu Abbas meriwayatkan, beliau ditanya tentang seorang lelaki yang meminum susu murni, apakah dia harus berwudlu? Beliau menjawab, "Bermudahlah niscaya engkau akan diberi kemudahan." Yakni gampangkanlah nicaya Allah akan memberi keringanan untukmu dan atasmu.³⁶

Dalam Islam, istilah toleran dikenal dengan konsep “*tasamuh*” yang merujuk pada pemaknaan sikap *kemurahan hati* dan cenderung pada *kemudahan*. Istilah itu selalu dipergunakan dalam bentuk resiprokal atau hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Dengan demikian *tasamuh* (inklusif) dalam Islam bisa dimaknakan membangun sikap untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, saling membantu, dan saling memberi kemudahan antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian, *tasamuh* (toleransi) adalah "Sikap (akhlak) dengan teraktualisasi dengan saling berlaku baik, lemah lembut,

³⁵ Secara lengkap hadits ini bisa dilacak dalam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary* (Beirut: DAr al-Minhaj, Jilid I, 1996), Cet. I., 94.

³⁶ Jamaludin Muhammad bin Mukram ibn Mandzur, *Lisan al-arab* (Beirut: Dar Shadir, t.th), 498.

membantu, dan saling pemaaf." Dalam pengertian istilah umum, *tasamuh* adalah "sikap (akhlak) terpuji dalam pergaulan, yang didasari rasa saling memahami dan saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam dan kesepakatan bersama (*kalimat al-sawa*)."³⁷

Yang dimaksud dengan kalimat al-sawa di sini adalah konvensi atau kesepakatan bersama di antara pemeluk agama atau setiap anggota masyarakat. Dalam sejarah Islam, kalimat al-sawa ini diwujudkan oleh Rasulullah dalam bentuk piagam *Madinah. Kalimatal-Sawa* ini juga dapat dimaknai sebagai "kerelaan umat Islam ketika menghilangkan tujuh kata dalam *Preamble* UUD 1945 pada masa proses perumusan konstitusi Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, toleransi dapat dimaknai sebagai" kemauan untuk memahami dan menjalankan berbagai aturan dan kesepakatan yang dimaksudkan untuk menjaga kebersamaan, persaudaraan, kedamaian, kemanaan, dan keutuhan bangsa dan negara".

Akidah Islam sangat menekankan pentingnya sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling berbuat baik antara sesama muslim dan kepada umat yang lain. Bahkan memaksakan islam kepada pemeluk agama lain saja mendapatkan kecaman di dalam al-Quran, *laa ikraba fid din*. Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi akademik yang bisa diajukan untuk mengarusutamakan narasi toleran dalam mata kuliah akidah-akhlak adalah dengan memberikan pemahaman-pemahaman kunci sebagaimana berikut:

- a. Perbedaan agama yang lengkap dengan implikasi teologis dan sosiologisnya merupakan kehendak Allah. Berupaya apalagi berkeinginan untuk menyeragamkan keberagaman manusia, sama halnya menyalahi fitrah manusia yang dikarunikan Allah. Tugas mahasiswa islam adalah memperkuat akidah islam serta menghargai akidah umat manusia lain seraya tetap melakukan kerjasama bahkan saling kritik hanya pada bidang sosial, bukan teologi.

³⁷ Dalam konteks keindonesiaan, kesepakatan bersama (*kalimatun sawa*) termanifestasikan dalam bentuk ideologi negara, yakni Pancasila. Dalam setiap butir pancasila, terkandung nilai-nilai universal yang secara etis dimiliki oleh semua agama, suku dan adat kepercayaan masyarakat Indonesia. Sehingga, Pancasila merupakan pintu masuk yang paling netral untuk membentuk masyarakat yang saling menjaga persatuan dan kesatuan.

- b. Apapun agama, bangsa dan warna kulitnya, manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia. itu sehingga pengharagaan atas nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) menjadi sebuah kewajiban teologis. Sebagaimana riwayat yang direkam oleh Imam Bukhari dari Jabir ibn Abdillah bahwa ada jenazah yang dibawa lewat dihadapan nabi Muhammad saw. lalu beliau berdiri untuk menghormatinya. Kemudian ada seseorang memberi-tahukan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah Yahudi.” Beliau menjawab dengan nada bertanya, “Bukankah ia juga manusia?”
- c. Pemahaman bahwa umat islam tidak diberikan kewajiban atau perintah untuk menilai orang lain, walaupun dia adalah non muslim sekalipun. Karena setiap keimanan seseorang adalah hak preogratif Allah yang tidak bisa diintervensi oleh nalar manusia manapun.
- d. Islam sebagai sebuah agama, dengannya melekat seperangkat nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Terutama menyeru pada keadilan dan kasih sayang atas semuan umat manusia. Bahkan Allah melalui al-Quran mengecam umat islam untuk berlaku tidak adil hanya karena orang lain dibenci oleh islam. “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kamu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa” (QS al-Maidah [5]: 8).
- e. Basis aqidah islam tidak memberikan paksaan kepada non muslim untuk menjadi islam. Disinilah letak sifat islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan hak-hak kemanusiaan yang paling nyata. Islam dengan segala keluhurannya, sangat tidak cocok dipaksakan baik aqidah maupun hukumnya dengan cara-cara kekerasan, apalagi melegitimasi tindakan terorisme serta radikalisme hanya karena alasan menjalankan hukum islam. Cara-cara yang tidak manusiawi dan ironisnya masih jamak terjadi ini, tentu menjadi kontraproduktif dengan titah Allah, bahwa “Tidak ada paksaan dalam agama” (QS. Al-Baqarah [2]: 256). walaupun islam adalah agama dakwah, namun dakwah yang dipraktikan juga harus sejalan dengan pedoman suci, yaitu Al-Quran yang menegaskan bahwa, “Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik” (QS. Al-Nahl [16]: 125).

- f. agama Islam diturunkan sesuai dengan kemampuan manusia. Hukum-hukum Islam dibangun di atas kemudahan dan tidak menyulitkan, norma-norma agama ini seluruhnya dicintai (oleh Allah) namun yang mudah dari itu semualah yang paling dicintai oleh Allah. Firman Allah, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS Al-Baqarah [2]:185). Oleh sebab itu, tidak boleh mempersulit diri dalam menjalankan agama Allah dan tidak boleh pula membuat sulit hamba-hamba Allah. Tiada seorangpun yang mempersulit agama ini melainkan dia pasti akan kalah. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana perbuatan Bani Israil, tatkala mereka mempersulit diri, Allah-pun mempersulit mereka. Kalau seandainya mereka mempermudahnya, niscaya mereka akan diberi kemudahan.

Kesimpulan

Pembelajaran agama islam di Perguruan Tinggi umum, terutama pada aspek akidah akhlak, menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan aspek kebangsaan dan kemanusiaan. Ikhtiar akademik ini menjadi niscaya mengingat PTU dalam banyak survei memperlihatkan fenomena yang ironi. Yakni tumbuh suburnya bibit intoleransi yang di satu sisi tak menghormati hak asasi orang lain, dan pada sisi yang lain berpotensi menyulut api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu, diperlukan gagasan yang mampu menjadi benteng bagi membiaknya pemikiran-pemikiran ekstrem yang mengatasnamakan agama melalui pembelajaran pendidikan islam yang tepat. Dalam konteks kekinian, pendidikan islam tak bisa dilakukan dan dipahami secara konvensional. Ia harus berkelindan seiring dengan nafas perubahan zaman.

Dalam hal ini mengarusutamakan prinsip kebhenekaan melalui spirit ketauhidan merupakan usaha mengkontekstualisasikan ajaran islam di tengah pluralitas dan multikulturalitas sebuah negara. Di satu sisi juga diperlukan penguatan narasi keagamaan yang lebih toleran, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan agar islam tak mencerminkan sebagaimana di Timur Tengah. Agama menjadi pemberontak negara, dan negara menjadi penindas agama. Fenomena ini karena masih belum tuntasnya pemahaman atas relasi agama dan negara. Selanjutnya, di era *millenial* seorang dosen juga harus membekali mahasiswa dengan kompetensi literasi digital. Agar tidak termakan dan terseret informasi-informasi yang merusak hubungan sosio-emosional

antar warga negara. Memperlakukan informasi digital dengan kritis dan evaluatif menjadi bagian tak terpisahkan dalam konteks sekarang. Karena jejaring internet saat ini menjadi piranti penting dalam untuk memperbaiki paham keagamaan masyarakat di tengah gempuran informasi yang nyaris tanpa perlawanan.

Daftar Rujukan

- al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bary*. Beirut: Dar al-Minhaj, Jilid I. Cet. I. 1996.
- Ang, I. (2010). "Between Nationalism and Transnationalism: Multiculturalism in a Globalising World. Institute for Culture and Society Occasional" *Paper* 1.1, 1(1), 1–14.
- Atanasovski, S. (2015). "Hybrid affects of religious nationalism: Pilgrimages to Kosovo and the Soundscapes of the Utopian Past". *Southeastern Europe*, 39(2), 237–263. <https://doi.org/10.1163/18763332-03902005>
- Bakhash, Osman. *Islamic Contribution within the World Civilization; Past, Present, and Future* dalam Proceeding JICMI. Jakarta International Conference of Muslim Intellectuals. 2013.
- Hafidz, Edi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press. t.t
- Ibn Mandzur, Jamaludin Muhammad bin Mukram. T.th. *Lisan al-arab*. Beirut: Dar Shadir. t.t.
- Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil*. USA: HarperCollins Publishers Inc, Cet 10. 2008.
- Munir, *Multimedia: Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Pulungan, Sahmiar. "Pemanfaatan ICT Dalam Pembelajaran PAI". *Query: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 1. 2017.
- Sahri. "Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam". Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 6, No. 1. 2016.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

- Sayegh, P. Y. (2011). "Nationalism As a Social Imaginary: Negotiations of Social Signification and (Dis)Integrating Discourses in Britain", *France and Poland*.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1995.
- Tim GLN Kemendikbud, *Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017.